


Zonasi Dalam Penerimaan Murid Baru: Dampak Dan Upaya Penyelesaiannya

Susiana Setianingsih¹, Otti Ilham Khair², Gede Wijaya Kusuma³, Marisa Permatasari⁴, Joko Susilo Raharjo⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

E-mail: susianasetianingsih1@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.602>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 02 May 2025

Revised: 06 May 2025

Accepted: 10 May 2025

Kata Kunci:

zonasi, akses pendidikan, kebijakan publik

Keywords:

zoning, education access, public policy



ABSTRACT

Penelitian ini membahas kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru di Indonesia, yang bertujuan untuk menjamin pemerataan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah. Zonasi dimaksudkan untuk mendekatkan siswa dengan sekolah di wilayah tempat tinggalnya dan mengurangi ketimpangan kapasitas antar sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka untuk menganalisis literatur terkait konsep, dampak, serta solusi atas tantangan dalam implementasi zonasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan ini meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan memperkuat posisi sekolah di daerah tertinggal. Namun, juga menimbulkan segregasi sosial dan ketidakadilan bagi siswa dari wilayah yang berkelanjutan, penguatan infrastruktur sekolah terpinggirkan, dan keterlibatan aktif masyarakat untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata

This study explores the zoning policy in the Indonesian new student admission system, aimed at ensuring equitable access to education and improving the quality of education across regions. The zoning system is designed to align students with schools in their residential areas and reduce disparities in school capacity. A qualitative literature review method was employed to analyze sources discussing the concept, impacts, and solutions related to zoning implementation. Findings reveal that the policy enhances educational accessibility for lower-income communities and strengthens schools in underdeveloped areas. However, it also leads to social segregation and perceived inequity for students residing in less-preferred zones. Therefore, continuous policy evaluation, improvement of infrastructure in marginalized schools, and active community participation are essential to achieve a more just and equitable education system.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Susiana Setianingsih et al.(2025 Zonasi Dalam Penerimaan Murid Baru: Dampak Dan Upaya Penyelesaiannya 3(4) 1623-1627, doi:<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.602>

PENDAHULUAN

Zonasi dalam penerimaan murid baru adalah suatu sistem yang diterapkan oleh sekolah untuk membatasi wilayah geografis dari mana siswa dapat diterima. Oleh karena itu pemerintah membatasi regulasi dalam mengatur penerimaan murid baru melalui sistem zonasi. Hal itu tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Tujuan peraturan ini adalah untuk menjamin pemerataan akses terhadap layanan pendidikan, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan

rumah, menghilangkan diskriminasi di sekolah khususnya sekolah negeri, dan membantu penghitungan dan analisis kebutuhan tenaga pendidik. Selain itu juga untuk mengatur distribusi siswa secara merata dan meminimalkan kemungkinan *over capacity* di sekolah-sekolah yang populer. Dalam konteks Indonesia, kebijakan zonasi telah diadopsi sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketimpangan pendidikan antar daerah serta memperluas akses pendidikan berkualitas bagi semua. Dampak dari kebijakan zonasi ini cukup beragam. Salah satunya adalah adanya peningkatan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi. Dengan membatasi wilayah penerimaan, sekolah-sekolah yang biasanya menjadi favorit bagi siswa-siswa dari kelompok ekonomi menengah ke atas tidak lagi mengalami kelebihan kapasitas yang berlebihan. Sebagai akibatnya, sekolah-sekolah di daerah yang sebelumnya kurang diminati menjadi lebih diminati, yang pada gilirannya dapat memperkuat infrastruktur pendidikan di daerah tersebut. Namun demikian system zonasi sesungguhnya mempermudah pengawasan orangtua dalam mengawasi anaknya (Salim & Nora, 2022).

Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, beberapa upaya dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan evaluasi yang cermat terhadap implementasi kebijakan zonasi, termasuk pemantauan terhadap distribusi siswa dan kualitas pendidikan di setiap wilayah. Selanjutnya, perlu adanya program-program pendukung yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang terpinggirkan. Misalnya, pemberian dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur, pelatihan guru, atau program bantuan belajar bagi siswa-siswa kurang mampu. Selain itu, penting juga untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam mendukung pendidikan di wilayah masing-masing, baik melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan maupun dukungan aktif terhadap kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah setempat. Dengan demikian, kebijakan zonasi dalam penerimaan murid baru dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperbaiki aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Indonesia, asalkan dilakukan dengan cara yang bijaksana dan berkeadilan, Meskipun demikian kebijakan zonasi ini berpotensi untuk menimbulkan kecurangan (Salim & Nora, 2022)

Aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan merupakan faktor penting dalam memastikan setiap individu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Dalam konteks zonasi, kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan memastikan bahwa setiap wilayah memiliki sekolah yang mampu menampung siswa-siswanya. Namun, dampaknya bisa bermacam-macam. Sementara kebijakan zonasi dapat memperluas aksesibilitas bagi masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi, namun juga berpotensi menciptakan segregasi sosial antar sekolah dan menimbulkan perasaan tidak adil bagi siswa-siswa yang tinggal di wilayah yang kurang diminati oleh sekolah-sekolah berkualitas. Teori ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan pendidikan seperti zonasi harus mempertimbangkan baik aspek aksesibilitas maupun keadilan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas. Aksesibilitas pada prinsipnya adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat semakin mudah dan praktis untuk mendapatkan pelayanan publik (Sari et al., 2014). Dalam konteks zonasi, kebijakan tersebut mencerminkan upaya untuk mengatasi ketimpangan pendidikan antar wilayah. Namun, implementasi kebijakan zonasi juga dapat memperkuat atau bahkan menciptakan ketimpangan sosial baru antara sekolah-sekolah yang terletak di wilayah yang berbeda. Siswa dari latar belakang ekonomi rendah mungkin memiliki akses yang terbatas terhadap sekolah-sekolah berkualitas di wilayah yang kaya. Oleh karena itu, teori sosiologi pendidikan mengingatkan pentingnya memperhatikan faktor-faktor sosial dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang setara dalam mendapatkan pendidikan berkualitas (Khadowmi, 2019).

Dalam konteks zonasi, kebijakan tersebut berdampak pada distribusi siswa di antara sekolah-sekolah dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan bagaimana kurikulum disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setiap sekolah. Sekolah-sekolah yang mungkin menerima siswa dengan latar belakang yang beragam perlu memiliki kurikulum yang fleksibel dan inklusif untuk mendukung keberhasilan semua siswa. Dengan memperkuat kurikulum yang responsif terhadap keberagaman siswa, kebijakan zonasi dapat menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan (Rachmadhany, 2021). Tugas pemerintah sebagai regulator adalah menerbitkan suatu kebijakan publik. Setelah disahkan oleh pejabat berwenang, kebijakan publik tersebut harus disesuaikan dengan kondisi yang dalam suatu lingkungan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya untuk membuat kerangka untuk memahami dan membaca literatur yang dikumpulkan. Pada tahap analisis, data dikumpulkan, diatur, dan disintesis. Setelah itu, dilakukan analisis hasil dan menentukan artinya. Penelitian ini menggunakan literatur yang berkaitan dengan zonasi penerimaan murid baru, dampak dan upaya untuk menyelesaikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zonasi dalam Penerimaan Murid Baru: Konsep, Implementasi, dan Tujuan

Zonasi dalam penerimaan murid baru adalah suatu kebijakan yang telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengatur distribusi siswa berdasarkan wilayah geografis. Konsep dasarnya adalah membagi wilayah menjadi zona-zona tertentu dan membatasi penerimaan murid baru di sekolah-sekolah berdasarkan zona-zona tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan antar daerah dalam hal ketersediaan dan kualitas pendidikan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan zonasi pertama kali diperkenalkan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan setiap anak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Implementasi kebijakan zonasi dilakukan oleh masing-masing daerah dengan memperhatikan karakteristik wilayahnya masing-masing. Peraturan zonasi didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Peraturan ini merupakan panduan teknis bagi sekolah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru. Salah satu aspek yang diatur di dalamnya adalah penerapan sistem zonasi dalam penerimaan murid baru. Pasal 18 ayat (1) peraturan ini mengatur bahwa sekolah harus menerapkan zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru, dengan memperhatikan batas wilayah geografis yang telah ditetapkan. Landasan hukum ini memberikan dasar legal bagi sekolah untuk menjalankan kebijakan zonasi dalam penerimaan murid baru dan memberikan petunjuk teknis mengenai implementasinya (Setiawan, 2021). Proses penerapan zonasi ini melibatkan penetapan batas wilayah untuk setiap zona, identifikasi sekolah-sekolah yang termasuk dalam masing-masing zona, dan pengumuman kebijakan penerimaan murid baru berdasarkan zona-zona tersebut (Savitri, 2021).

Dampak Positif dan Negatif dari Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Murid Baru

Dampak positif dari kebijakan zonasi dalam penerimaan murid baru adalah peningkatan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi. Dengan membatasi penerimaan murid berdasarkan wilayah, sekolah-sekolah yang sebelumnya populer tidak lagi mengalami kelebihan kapasitas yang berlebihan, sehingga memungkinkan siswa-siswa dari wilayah yang kurang diminati untuk lebih mudah diterima di sekolah berkualitas. Ini membantu meminimalkan kemacetan di sekolah-sekolah populer dan meningkatkan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpinggirkan. Namun, di sisi lain, dampak negatif dari kebijakan zonasi termasuk potensi terjadinya segregasi sosial antar sekolah. Wilayah yang terpinggirkan atau miskin mungkin memiliki akses yang terbatas terhadap sekolah-sekolah berkualitas di wilayah yang lebih makmur, sehingga menciptakan kesenjangan pendidikan yang lebih besar (Winarti, 2023).

Upaya Penyelesaian Dampak Negatif Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Murid Baru

Untuk menyelesaikan dampak negatif dari kebijakan zonasi dalam penerimaan murid baru, perlu dilakukan berbagai upaya yang berkelanjutan. Pertama, evaluasi yang cermat terhadap implementasi kebijakan zonasi sangat diperlukan. Evaluasi ini harus mencakup pemantauan terhadap distribusi siswa di sekolah-sekolah, kualitas pendidikan yang disediakan, dan dampaknya terhadap kesenjangan pendidikan antar wilayah. Dari hasil evaluasi ini, dapat diidentifikasi masalah-masalah utama yang perlu diatasi dan langkah-langkah konkrit yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan zonasi. Selanjutnya, perlu adanya program-program pendukung yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang terpinggirkan (Baskara, 2023).

Misalnya, pemberian dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur, pelatihan guru, atau program bantuan belajar bagi siswa-siswa kurang mampu. Selain itu, penting juga untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam mendukung pendidikan di wilayah masing-masing. Partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu memastikan bahwa kebijakan zonasi disusun dan diimplementasikan dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi lokal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan zonasi dalam penerimaan murid baru dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperbaiki aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Indonesia, serta mengatasi dampak negatifnya dengan cara yang berkelanjutan dan berkeadilan (Annisa, 2022).

Kelompok Penerima Manfaat dan Kelompok yang Tidak Memperoleh Manfaat dari Kebijakan Zonasi

Kelompok penerima manfaat dari kebijakan zonasi adalah siswa-siswa dari wilayah yang sebelumnya kurang diminati oleh sekolah-sekolah berkualitas. Mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk diterima di sekolah-sekolah yang lebih baik karena tidak bersaing dengan siswa-siswa dari wilayah yang lebih makmur. Selain itu, sekolah-sekolah di daerah terpinggirkan juga menjadi lebih diminati, sehingga meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat setempat. Namun, kelompok yang tidak memperoleh manfaat dari kebijakan zonasi adalah siswa-siswa dari wilayah yang sudah memiliki sekolah-sekolah berkualitas. Mereka mungkin merasa dirugikan karena harus bersaing dengan lebih banyak siswa untuk mendapatkan tempat di sekolah-sekolah favorit. Selain itu, kebijakan zonasi juga dapat menyebabkan siswa-siswa dari latar belakang ekonomi yang sama tetapi berbeda wilayah mengalami perlakuan yang tidak adil dalam hal akses pendidikan (Satria, 2019).

Kesenjangan antara Rencana dan Hasil Kebijakan Zonasi

Meskipun kebijakan zonasi dalam penerimaan murid baru bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan, terdapat kesenjangan antara rencana dan hasil kebijakan tersebut. Rencana awalnya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan merata bagi semua siswa, namun dalam kenyataannya kebijakan ini dapat mengakibatkan segregasi sosial dan kesenjangan pendidikan yang lebih besar. Implementasi kebijakan zonasi seringkali tidak memperhitungkan secara mendalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setiap wilayah, sehingga menghasilkan dampak yang tidak diinginkan. Selain itu, kurangnya evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi kebijakan zonasi juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi siswa di antara sekolah-sekolah, yang pada akhirnya memperkuat ketimpangan pendidikan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk menyeimbangkan antara tujuan kebijakan zonasi dengan hasil yang diinginkan, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat (Santringin, 2023)..

SIMPULAN

Kebijakan zonasi dalam penerimaan murid baru menunjukkan adanya upaya konkret untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan. Meskipun memiliki dampak positif dalam meminimalkan kemacetan di sekolah-sekolah populer dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti segregasi sosial antar sekolah dan perasaan tidak adil bagi siswa-siswa dari wilayah yang kurang diminati oleh sekolah-sekolah berkualitas. Oleh karena itu, upaya-upaya penyelesaian yang berkelanjutan dan berkeadilan sangat diperlukan. Evaluasi yang cermat terhadap implementasi kebijakan zonasi, penyediaan program-program pendukung untuk sekolah-sekolah yang terpinggirkan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pendidikan di wilayahnya masing-masing adalah langkah-langkah yang penting untuk diambil. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan zonasi yang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi lokal. Dengan demikian, kebijakan zonasi dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan pemerataan akses pendidikan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat

REFERENSI

- Annisa, V., & Dian Andriasari, S. H. (2022). Kajian Yuridis Kriminologis Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Domisili Pada Pendaftaran Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi Di Kota Bandung. In *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2 (1), 127-133.
- Baskara, A. C. (2023). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sma Negeri Tahun Ajaran 2021/2022 Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Khadowmi, E. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah.
- Rachmadhany, F., & Matin, M. (2021). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 14 Bekasi. *Wahana*, 73(1), 84-98.
- Santringing, N. L., & Sandiasa, G. (2023). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Elektronik (E-PPDB) Tingkat SMP Berbasis Pemetaan Zonasi Di Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Sawan. *Locus*, 15(1), 1-16.
- Satria, D. (2019). Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi terhadap Mutu Belajar Siswa di SMA Negeri 2 Bandar Lampung.
- Savitri, A., & Rahaju, T. (2021). Implementasi Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai Upaya Pemerataan Mutu Pendidikan (Studi pada Jenjang SMA Negeri di Kota Surabaya). *Publika*, 9 (1) 161-170.
- Setiawan, H. R., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP Di Kota Surabaya. *Publika*, 9 (4) 491-502.
- Winarti, N., Rahmi, K., & Charin, R. O. P. (2023). Harapan Pemerataan Menghadirkan Kesenjangan: Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2), 210-225.